

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN DANA DESA DALAM  
PENGENTASAN KEMISKINAN (STUDI KASUS DI DESA SUKAPURA  
KECAMATAN SUKAPURA KABUPATEN PROBOLINGGO PROVINSI JAWA  
TIMUR)**

Bekti Probo Asridiri

NPP. 30.0783

*Asdaf Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur*

*Prodi Studi Kebijakan Publik*

Email: 30.0783@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing: Dr. Drs. Herry Soesanto, M.Si

**ABSTRACK**

**Problem Statement/Background (GAP):** The problem in this study is the implementation of the policy of using village funds as one of the efforts to alleviate poverty in Sukapura Village. The study of the implementation of village fund policy uses Grindle Implementation Theory (1980), the theory is in accordance with existing problems because the problems in the theory concern internal aspects in a government bureaucracy. **Purpose:** The purpose of this study is to describe the policy of using village funds as an effort to alleviate poverty in Sukapura Village and to determine the inhibiting factors in the implementation of policies using village funds in poverty alleviation through the Grindle Implementation Theory (1980). **Method:** The qualitative research method is used by the author to reveal the processes and obstacles that exist in the implementation of this village fund policy, to explain the data obtained from interviews, observations and documents related to the research. The determination of informants is carried out by sampling, in accordance with the needs and objectives of research where the informants determined are the Head of the Community and Village Empowerment Office of Probolinggo Regency, Sukapura Sub-District, Sukapura Village Apparatus and the Sukapura Village Community. **Results:** The result of this study is that the implementation of the policy of using village funds in poverty alleviation efforts in Sukapura Village has not run optimally because of the interests outside of this policy, especially the interests of stakeholders who are very influential in the implementation of this policy. Judging from the benefits of Village Funds, it has not been felt by the entire community because there are many benefits that have not been obtained by the community, especially for poverty alleviation. **Conclusion:** The implementation of the policy of using village funds for poverty alleviation has been implemented in Sukapura Village through the Direct Assistance program. However, from the results of observations and data mining through interviews and observations conducted by researchers, it shows that the implementation of village fund policies in Sukapura Village is still not optimal.

**Keywords:** village fund, poverty, interests, benefits.

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Permasalahan dalam penelitian kali ini adalah implementasi kebijakan penggunaan dana desa sebagai salah satu upaya dalam mengentaskan kemiskinan di Desa Sukapura. Kajian terhadap implementasi kebijakan dana desa ini menggunakan Teori Implementasi Grindle (1980), teori tersebut sesuai dengan permasalahan yang ada karena dalam permasalahan dalam teori tersebut menyangkut dari aspek intern dalam suatu birokrasi pemerintahan. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini yakni mendeskripsikan kebijakan penggunaan dana desa sebagai upaya untuk pengentasan kemiskinan di Desa

Sukapura dan mengetahui faktor penghambat dalam implementasi kebijakan penggunaan dana desa dalam pengentasan kemiskinan melalui Teori Implementasi Grindle (1980). **Metode:** Metode penelitian kualitatif digunakan penulis guna mengungkapkan proses dan penghambat yang ada dalam implementasi kebijakan dana desa ini, sehingga bisa menjelaskan data yang didapatkan dari wawancara, observasi dan dokumen yang berhubungan dengan penelitian. Penentuan informan dilakukan secara sampling, sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian dimana informan yang ditentukan yakni Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo, Camat Sukapura, Perangkat Desa Sukapura dan Masyarakat Desa Sukapura. **Hasil/Temuan:** Hasil pada penelitian ini yakni implementasi kebijakan penggunaan dana desa dalam upaya pengentasan kemiskinan di Desa Sukapura belum berjalan dengan maksimal karena adanya kepentingan diluar dari kebijakan ini terutamanya kepentingan dari stakeholder yang sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan ini. Dilihat dari manfaat Dana Desa juga belum bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat karena banyak manfaat yang belum didapatkan oleh masyarakat terutama untuk pengentasan kemiskinan. **Kesimpulan:** Implementasi kebijakan penggunaan dana desa untuk pengentasan kemiskinan sudah dilaksanakan di Desa Sukapura melalui program Bantuan Langsung. Namun dari hasil pengamatan serta penggalan data melalui wawancara maupun observasi yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dana desa di Desa Sukapura masih belum optimal.

**Kata Kunci:** Dana Desa, Kemiskinan, Kepentingan, Manfaat.

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Penggunaan dana desa berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2014 dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. 2 Prinsip akuntabilitas penggunaan Dana Desa dimaksudkan dimana dana desa dikelola dengan akuntabel dan transparan seperti yang tertulis dalam PP Nomor 60 Tahun 2014 mengatur tentang penyaluran dana desa yang diterima oleh kabupaten terlebih dahulu melalui bagian keuangan desa dari Dana Desa dalam rangka untuk penyelenggaraan rumah tangga desa.

Kebijakan Dana Desa ini diperuntukan bagi seluruh desa di Indonesia, termasuk Desa Sukapura yang merupakan sebuah desa di Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Desa Sukapura memiliki luas 1.312,63 Ha di ketinggian 600-1.850m diatas permukaan air laut dan berada di lereng Gunung Bromo. Desa Sukapura memiliki batas wilayah yang terbagi menjadi sebelah utara berbatasan dengan Desa Ngepung; sebelah selatan berbatasan Desa Wonokerto sebelah barat berbatasan dengan Desa Ngadirejo & Sapikerep; dan untuk sebelah timur berbatasan dengan Desa Pakel.

Desa Sukapura memiliki penduduk berjumlah 1.569 jiwa. Tingkat pendidikan dari masyarakat Desa Sukapura rata-rata adalah tingkat SMP sebesar 50,89%. Dengan tingkat pendidikan masyarakat pada suatu wilayah berpengaruh terhadap mata pencaharian dari masyarakat tersebut. Seperti halnya di Desa Sukapura mata pencaharian masyarakatnya sebagian besar adalah sebagai petani sebesar 42,15% diikuti dengan peternak sebesar 35,95% dan terakhir sebagai buruh tani sebesar 16,96%.

Desa Sukapura juga mendapatkan bantuan dana desa yang diimplementasikan dengan fokus utama untuk membantu peningkatan dan pengentasan kemiskinan yang ada di Desa Sukapura serta untuk percepatan dalam pencapaian SDGs Desa Sukapura. Berdasarkan tujuan yang diwujudkan dalam program pemberian bantuan langsung berupa sembako kepada masyarakat desa guna pengentasan kemiskinan di Desa Sukapura. Dalam pelaksanaan program

dari kebijakan dana desa di Desa Sukapura untuk pengentasan kemiskinan ditemukan beberapa permasalahan yang menghambat dalam implementasi dana desa untuk mencapai tujuan prioritas dari pemerintah Desa Sukapura. Permasalahan yang ditemui yakni penggunaan dana desa dalam wujud bantuan sembako yang tidak tepat sasaran kepada penerima bantuan yang seharusnya untuk warga miskin dan pemanfaatan BUMDes sebagai sarana untuk pengentasan kemiskinan.

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini bisa menjadi bahan evaluasi bagi pelaku implementor kebijakan khususnya Pemerintah Desa Sukapura di Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur dalam memaksimalkan pemanfaatan dana desa baik kepada pemerintah pusat ataupun kepada masyarakat desa yang menjadi tanggung jawab dari Pemerintah Desa Sukapura. Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Sukapura, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo dengan judul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN (STUDI KASUS DI DESA SUKAPURA KECAMATAN SUKAPURA KABUPATEN PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR)”**.

## **1.2 Kesenjangan Masalah**

Permasalahan yang menghambat tercapainya prioritas dana desa yakni penggunaannya untuk membantu pengentasan kemiskinan masih belum berjalan maksimal yang dibuktikan dengan jumlah penduduk miskin di Desa Sukapura dari tahun 2018 sampai dengan 2021 yang sempat mengalami penurunan pada 2018 hingga 2019. Lalu meningkat cukup signifikan dari tahun 2019 hingga tahun 2021. Tidak hanya permasalahan yang sudah disebutkan, juga belum optimalnya Badan Usaha Milik Desa yang ditujukan sebagai sarana untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Desa Sukapura namun pada implementasinya BUMDesa belum memberikan sumbangsih dalam pengurangan angka kemiskinan di Desa Sukapura. Hal tersebut menyebabkan penggunaan dana desa di Desa Sukapura menjadi kurang maksimal serta mengakibatkan roda pemerintahan di desa menjadi terhambat. Belum optimalnya BUMDesa dalam upaya pengentasan kemiskinan di Desa Sukapura, dapat dilihat dari banyaknya masyarakat Desa Sukapura yang memiliki usaha berupa souvenir maupun oleh-oleh khas masih dikelola secara swakelola. BUMDesa yang seharusnya bisa menaungi warga miskin di Desa Sukapura dengan menjadi wadah bagi warga yang memiliki usaha dan juga menjadi lapangan pekerjaan bagi warga miskin di Desa Sukapura. BUMDesa yang ada di Desa Sukapura hingga saat ini masih belum ada Hal tersebut membuat penulis melakukan penelitian ini dengan fokus pada penggunaan dana desa dalam pengentasan kemiskinan di Desa Sukapura, Kabupaten Probolinggo yang merupakan sumber utama alokasi dana dari kebijakan dana desa yang berasal dari APBN yang ditransfer melalui APBD Kabupaten Probolinggo dengan prioritas untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan desa.

## **1.3 Penelitian Terdahulu**

Pertama, Endik Hidayat (2020) Implementasi Kebijakan Dana Desa untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19. Hasil penelitian yakni Penelitian ini menghasilkan jika implementasi kebijakan dana desa untuk pandemi Covid-19 berjalan dengan cukup baik dengan dibarengi factor yang mendukung keberhasilannya dari dimensi komunikasi, struktur birokrasi, koordinasi antar implementor. Selain itu juga ditemukan faktor penghambat dari dimensi sumber daya (Hidayat, 2020).

Kedua, Indra Pahlevi (2015) Dana Desa dan Permasalahannya. Hasil penelitian ini yakni Peneliti menemukan sumber-sumber dari permasalahan yang terjadi dalam penggunaan dana desa (Pahlevi, 2015).

Ketiga, Yanhar Jamaluddin (2018) Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah. Hasil dari penelitian ini adalah pengelolaan dan penggunaan Dana Desa tidak berdampak signifikan bagi pembangunan Daerah (RPJM Daerah)(Jamaluddin, 2018).

Keempat, Gary Jonathan Mingkid (2017) Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Peningkatan Pembangunan (Suatu Studi di Desa Watutumou Dua Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara). Hasil dari penelitian ini yakni pencapaian tujuan dana desa dalam peningkatan pembangunan di Desa Watutumou dua sudah tercapai karena pemerintah desa konsisten dalam musyawarah desa guna pembangunan sehingga mendapatkan respon yang baik dari masyarakat(Mingkid, 2017).

Kelima, Meika Rozandi (2021) Implementasi Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan (Studi Kasus Desa Sengkubang Kecamatan Mempawah Hilir Provinsi Kalimantan Barat). Hasil dari penelitian ini yakni pembangunan di Desa Sengkubang berdasarkan Pusat Data Desa Indonesia menunjukkan Indeks Desa Membangun (IDM) dari tahun 2018 hingga 2020 mengalami peningkatan yang menyebabkan Desa Sengkubang termasuk klasifikasi desa mandiri(Rozandi, 2021).

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yakni sebagai berikut.

Pertama, Endik Hidayat (2020) Pada penelitian ini fokus mengkaji dari tujuan penelitian dimana bertujuan memahami kebijakan dana desa untuk penanggulangan pandemi Covid sedangkan penulis bertujuan untuk mengetahui pengelolaan keuangan desa.

Kedua, Indra Pahlevi (2015) Pada penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan observasi dan pemberitaan dari media. Sedangkan pada penelitian penulis menggunakan metode studi kasus dan wawancara guna pengumpulan data.

Ketiga, Yanhar Jamaluddin (2018) Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi pustaka. Sedangkan pada penelitian yang dirancang penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus (case study).

Keempat, Gary Jonathan Mingkid (2017) Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dalam penggunaan dana desa di Desa Watutumou Dua. Sedangkan penulis bertujuan untuk mengetahui penyebab penggunaan dana desa yang belum sesuai dengan prioritas desa.

Kelima, Meika Rozandi (2021) Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus/tujuan penelitian dimana pada penelitian ini menganalisis pelaksanaan Dana Desa di Desa Sengkubang. Sedangkan penelitian penulis berfokus terhadap seberapa manfaat yang dirasakan masyarakat desa dengan adanya dana desa di Desa Sukapura.

#### **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan dan mendeskripsikan implementasi kebijakan penggunaan dana desa dalam pengentasan kemiskinan (studi kasus di Desa Sukapura, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur). Mendeskripsikan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan penggunaan dana desa dalam pengentasan kemiskinan (studi kasus di Desa Sukapura, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur)

## **II. METODE**

Penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif case study dan phenomenological research digunakan pada penelitian ini dengan tujuan agar peneliti berfokus dalam mendeskripsikan atau menggambarkan peristiwa dan kejadian yang terjadi di lapangan. Konsep

yang peneliti gunakan dalam penelitian Implementasi Dana Desa ini dari teori implementasi kebijakan yang diungkapkan oleh Mirelle S. Grindle.

Informan pada penelitian ini terdapat 11 informan. Dalam penelitian ini teknik penentuan informan yang digunakan peneliti adalah *purposive sampling* (Sugiyono, 2019). Sumber data penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data Sekunder (Satori & Komariah, 2017). Pengumpulan Data bisa ditinjau juga dari Teknik Pengumpulan Data yang dibagi menjadi observasi (pengamatan), interview (wawancara), dokumentasi maupun gabungan keempat cara tersebut (Prof. Dr. A. Muri Yusuf. M.Pd., 2014). Analisa data, bagi Bogdan dan Biklen yakni suatu proses yang melibatkan bekerja dengan data, mengaturnya, memecahnya menjadi komponen-komponen yang dapat dikelola, menyintesisnya, mencari dan mengidentifikasi tren, serta menentukan apa yang signifikan dan signifikan. Analisis data Pada penelitian ini melalui beberapa langkah yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Dr. Rusmini. S.Ag. M.Pd.I, 2017).

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Pusat pada masa Presiden Joko Widodo, melalui Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Terluar memberikan bantuan dana yang bersumber dari APBN yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang disebut dengan Dana Desa.

Pemerintah pusat pada tahun 2022 menganggarkan dalam APBN untuk Dana Desa ini sebesar 68 Triliun, dan berdasarkan informasi dari perwakilan Kementerian Keuangan hingga Oktober 2022 sudah progress untuk kebijakan Dana Desa ini sudah tersalur sebesar 55,44 Triliun atau sebesar 81,53% dari keseluruhan pagu anggaran Dana Desa. Kebijakan Dana Desa yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sejak tahun 2015 telah disalurkan kepada pemerintah desa yang ada di seluruh Indonesia, termasuk salah satunya adalah Desa Sukapura yang berada di Kabupaten Probolinggo. Sejak pertama kali diimplementasikan, kebijakan dana desa ini penyalurannya dilakukan dengan sistem non-tunai atau transfer yang mekanisme terbagi dalam dua tahapan yakni Tahap Mekanisme Transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan Tahap Mekanisme Transfer APBD dari RKUD ke Kas Desa. Pemerintah Desa saat akan mencairkan dana desa harus dibarengi dengan menyertakan laporan pertanggung jawaban atas penggunaan dana desa pada tahap sebelumnya supaya dana desa tahap berikutnya bisa dicairkan. Selain menyertakan laporan pertanggung jawaban syarat untuk pencairan dana desa yakni harus menyertakan APBDesa tahun anggaran yang akan berjalan. Setelah mencantumkan APBDesa maupun Laporan Pertanggung Jawaban, dana desa tersebut bisa dicairkan sesuai dengan kebutuhan dari desa melalui rekening kas desa yang dikelola oleh bendahara desa.

#### 3.1 Implementasi Dana Desa Desa Sukapura

Dana Desa telah diimplementasikan diseluruh desa yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk juga di Desa Sukapura yang berada di Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Pengimplementasian dana desa di Desa Sukapura untuk tahun anggaran 2022 lebih difokuskan untuk percepatan pemulihan perekonomian masyarakat pasca pandemi Covid-19. Strategi yang diambil oleh pemerintah untuk memulihkan perekonomian masyarakat Sukapura pasca pandemi Covid-19 dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa. Bantuan langsung yang diberikan kepada masyarakat Sukapura oleh pemerintah desa diberikan sebanyak 2 kali pencarian dana desa selama 1 tahun anggaran karena Desa Sukapura dikategorikan ke Desa Mandiri. Sedangkan untuk pemberian BLT Dana Desa kepada masyarakat dilaksanakan sebanyak 4 kali yang dibagikan setiap 3 bulan. Untuk besaran BLT yang diterima masyarakat pada masing-masing tahap sebesar 300 ribu.

Sebelum melaksanakan pembagian BLT Dana Desa, pemerintah desa melakukan Musyawarah Desa dengan Kepala Dusun dan Kepala RT yang ada lingkup Desa Sukapura guna menentukan kriteria masyarakat yang layak menerima BLT Dana Desa. Selain membahas kriteria tersebut, dalam musyawarah desa juga membahas terkait data masyarakat yang tercatat sebagai penerima BLT apakah benar benar layak mendapatkan BLT dari Dana Desa atau tidak. Pembahasan tersebut dilaksanakan sebelum pelaksanaan pembagian BLT, karena setelah dibahas dalam musyawarah desa data tersebut selanjutnya dibawa atau diserahkan ke kecamatan yang berikutnya oleh kecamatan akan ditindak lanjuti untuk diserahkan kepada dinas terkait. hal tersebut dilakukan karena dikhawatirkan masyarakat yang tercatat sebelumnya sudah mengalami perubahan kondisi perekonomiannya.

Pemberian BLT di Desa Sukapura pada tahun 2022 untuk periode bulan Juli diberikan kepada masyarakat yang layak menerima berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan sejumlah 95 orang. orang tersebut oleh pemerintah desa diberikan BLT karena didasarkan dari pekerjaan yang dimiliki, pendapatan harian dari masyarakat tersebut dan jumlah anggota keluarga yang ditanggung oleh penerima BLT tersebut. Pembagian BLT pada tahun anggaran 2022 untuk tahap kedua (Bulan Juli) dilaksanakan pada bulan Oktober dikarenakan terjadi pergantian kepemimpinan dari kepala desa sebelumnya ke kepala desa baru sebagai hasil pemilihan umum kepala desa yang dilaksanakan pada bulan Februari 2022.

### **3.2 Pembahasan Implementasi Dana Desa melalui Teori Grindle**

#### **a) Isi Kebijakan**

Teori Implementasi yang diungkapkan oleh Grindle menjelaskan bahwa dalam implementasi suatu kebijakan faktor berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan tersebut dilihat dari indikator seperti yang dijelaskan dibawah ini :

##### **1. Kepentingan yang Mempengaruhi**

Implementasi kebijakan dana desa ada kepentingan lain dari luar kepentingan kebijakan dana desa dimana kepentingan tersebut juga terkait dengan kepentingan politik dari pihak yang memegang kekuasaan di Desa Sukapura maupun dari pihak-pihak yang berada di atasnya. Dalam implementasi kebijakan ini, terdapat oknum tertentu yang memiliki kepentingan yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan dana desa di Desa Sukapura sebagai salah satu upaya pengentasan kemiskinan yang ada. Berkaitan dengan adanya kepentingan-kepentingan diluar dari kebijakan dana desa bisa sangat berpengaruh terhadap implementasi kebijakan ini. Hal tersebut juga berakibat pada saat penyaluran bantuan langsung dana desa dimana banyak yang tidak tepat sasaran kepada warga yang membutuhkan dan adanya potongan-potongan nominal dari warga yang menerima bantuan langsung tersebut dengan alasan untuk biaya administrasi. Sehingga peneliti bisa menilai, implementasi kebijakan dana desa di Desa Sukapura sebagian besar masih terpengaruh oleh kepentingan-kepentingan kelompok maupun individu sehingga yang menjadi korban adalah warga Desa Sukapura yang seharusnya menerima bantuan langsung tersebut.

##### **2. Tipe Manfaat**

Terdapat perbedaan keterangan yang disampaikan terkait manfaat yang didapatkan dari kebijakan dana desa ini masih tergolong belum tercapai dan sesuai dengan tujuan dari implementasi kebijakan dana desa ini. Terutama untuk pos pengentasan kemiskinan melalui bantuan langsung tunai dana desa ini masih banyak yang tidak tepat sasaran sehingga manfaat dari kebijakan dana desa belum dirasakan oleh keseluruhan warga di Desa Sukapura. Tidak hanya itu, dari sektor BUMDes juga manfaat yang seharusnya bisa dirasakan oleh masyarakat Desa Sukapura dengan bantuan suntikan dana dari Dana Desa untuk BUMDes belum dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat secara keseluruhan.

### 3. Derajat Perubahan yang Ingin dicapai

Indikator derajat perubahan dari kebijakan dana desa di Desa Sukapura masih belum berjalan secara maksimal terutama derajat perubahan untuk tingkat kemiskinan yang seharusnya bisa menurun secara signifikan angka kemiskinan di Desa Sukapura. Akan tetapi, karena adanya beberapa kendala yang terjadi mengakibatkan derajat perubahan yang diinginkan tersebut belum berjalan secara maksimal. Keterangan yang disampaikan oleh Kepala Dinas PMD Kabupaten Probolinggo dan Camat Sukapura menyatakan apabila kebijakan dana desa ini memberikan perubahan di masyarakat terutama untuk menurunkan tingkat kemiskinan yang ada. Namun, menurut masyarakat Desa Sukapura belum ada derajat perubahan yang terjadi terutama untuk pengentasan kemiskinan.

### 4. Letak Pengambilan Keputusan

Jika kepala desa sebelumnya dalam mengambil keputusan terkait program bantuan langsung dana desa ini cenderung lebih berpihak kepada dirinya sendiri maupun untuk kelompoknya. Program yang diambil tersebut oleh kepala desa sebelumnya cenderung dimainkan untuk mendapatkan keuntungan terhadap dirinya sendiri maupun simpatisannya. Hal tersebut juga didukung dengan keterangan yang disampaikan oleh narasumber yang terkesan menutup-nutupi kejanggalan yang ada.

### 5. Pelaksana Program

Fakta yang ditemukan bahwa pelaksana program kebijakan dana desa (kepala desa dan pendamping) dalam menjalankan program ini masih belum kapabel. Hal tersebut didukung dengan keterangan dari masyarakat yang menyampaikan jika kepala desa dan pendamping desa berusaha mendapatkan keuntungan dari program kebijakan dana desa ini terutama pada bantuan langsung.

### 6. Sumberdaya yang digunakan

Sumber daya yang ada di Desa Sukapura seharusnya bisa menjadi pengawas dari pelaksanaan kebijakan dana desa ini. Dari wawancara dan observasi yang peneliti lakukan masyarakat tidak diberikan ruang atau kesempatan dalam melakukan pengawasan dalam implementasi kebijakan dana desa ini Sehingga masyarakat tidak bisa melaporkan kejadian-kejadian terkait program bantuan langsung dari dana desa.

## **b) Konteks Implementasi**

### 1. Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi dari Aktor yang terlibat

Setiap kebijakan yang diimplementasikan pasti terdapat partisipasi dari tingkat pemerintah pusat dan pemerintah daerah hingga tentunya pemerintah desa sebagai pelaksana program kebijakan ini. Yang dimaksud dari penjelasan tersebut yakni dalam setiap kebijakan yang dibuat selalu ada kepentingan maupun strategi dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa yang ikut dalam kebijakan ini.

Seperti halnya dalam implementasi kebijakan dana desa, terdapat kekuasaan yang mempengaruhi dalam implementasinya dimana kekuasaan tersebut berasal dari atas pemerintah Desa yang mana kekuasaan tersebut tentunya memiliki kekuatan politik yang lebih besar daripada yang dimiliki kepala desa. Kekuasaan yang lebih besar tersebut tentu saja membawa kepentingan dari golongannya maupun kepentingan pribadi ke dalam implementasi kebijakan dana desa ini sehingga berakibat terhadap strategi-strategi yang diambil oleh implementor kebijakan dana desa dalam hal ini yang menjadi implementor adalah Kepala Desa dan Pendamping Desa.

## 2. Karakteristik Lembaga dan Rezim yang berkuasa

Dalam implementasi kebijakan dana desa di lapangan, banyak sekali kepentingan dari rezim yang berkuasa untuk “mengatur” terkait implementasi kebijakan dana desa ini. Salah satu kepentingan yang “mengatur” adalah kepentingan dari bupati yang terkena tipikor kemarin dan membuat kepala desa yang menjabat sebelumnya melakukan tindakan-tindakan menyimpang dengan melakukan pemotongan dari bantuan langsung dana desa yang berikan kepada masyarakat. Dari keterangan yang dituturkan oleh Masyarakat (Andi), beliau mengatakan :

Kalau karakternya kepala desa yang lama itu mas karena dia “tangan kanan” dari bupati yang buat kades itu jadi mentingkan golongannya mas. Jadi masyarakat yang dikorbakan, meskipun ada BLT tapi masih banyak yang miskin. Kalau gak cocok atau masyarakat menolak, jelas ada mas. Soalnya liat tindakan-tindakan dari kepala desa lama yang lebih mentingkan golongannya atau orang-orang simpatisannya mas.

## 3. Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon dari Pelaksana

Berdasarkan analisis yang dilakukan peneliti dengan keterangan-keterangan yang diberikan masyarakat dimana tingkat kepatuhan dari stakeholder yang berwenang dalam implementasi kebijakan dana desa ini masih tergolong rendah. Dimana yang termasuk stakeholder dalam hal ini adalah kepala desa dan pendamping desa sendiri masih “memainkan” anggaran dana desa yang ada melalui celah-celah yang memungkinkan untuk dimainkan seperti pada pembuatan laporan pertanggung jawaban maupun laporan-laporan dari masyarakat tidak direspon dengan baik pihak-pihak pelaksana dari kebijakan ini.

### 3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Kebaharuan yang dilaksanakan peneliti terhadap penelitian oleh Endik Hidayat (2020) terletak pada Seperti halnya dalam implementasi kebijakan dana desa, terdapat kekuasaan yang mempengaruhi dalam implementasinya dimana kekuasaan tersebut berasal dari atas pemerintah Desa yang mana kekuasaan tersebut tentunya memiliki kekuatan politik yang lebih besar daripada yang dimiliki kepala desa. Kekuasaan yang lebih besar tersebut tentu saja membawa kepentingan dari golongannya maupun kepentingan pribadi ke dalam implementasi kebijakan dana desa ini sehingga berakibat terhadap strategi-strategi yang diambil oleh implementor kebijakan dana desa dalam hal ini yang menjadi implementor adalah Kepala Desa dan Pendamping Desa.

Kebaharuan yang dilaksanakan peneliti terhadap penelitian oleh Indra Pahlevi (2015) terletak pada Indikator derajat perubahan dari kebijakan dana desa di Desa Sukapura masih belum berjalan secara maksimal terutama derajat perubahan untuk tingkat kemiskinan yang seharusnya bisa menurun secara signifikan angka kemiskinan di Desa Sukapura. Akan tetapi, karena adanya beberapa kendala yang terjadi mengakibatkan derajat perubahan yang diinginkan tersebut belum berjalan secara maksimal. Keterangan yang disampaikan oleh Kepala Dinas PMD Kabupaten Probolinggo dan Camat Sukapura menyatakan apabila kebijakan dana desa ini memberikan perubahan di masyarakat terutama untuk menurunkan tingkat kemiskinan yang ada. Namun, menurut masyarakat Desa Sukapura belum ada derajat perubahan yang terjadi terutama untuk pengentasan kemiskinan.

Kebaharuan yang dilaksanakan peneliti terhadap penelitian oleh Yanhar Jamaluddin (2018) terletak pada Pemberian BLT di Desa Sukapura pada tahun 2022 untuk periode bulan Juli diberikan kepada masyarakat yang layak menerima berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan sejumlah 95 orang. orang tersebut oleh pemerintah desa diberikan BLT karena didasarkan dari pekerjaan yang dimiliki, pendapatan harian dari masyarakat tersebut dan jumlah anggota keluarga yang ditanggung oleh penerima BLT tersebut.

Kebaharuan yang dilaksanakan peneliti terhadap penelitian oleh Gary Jonathan Mingkid (2017) terletak pada Fakta yang ditemukan bahwa pelaksana program kebijakan dana desa



(kepala desa dan pendamping) dalam menjalankan program ini masih belum kapabel. Hal tersebut didukung dengan keterangan dari masyarakat yang menyampaikan jika kepala desa dan pendamping desa berusaha mendapatkan keuntungan dari program kebijakan dana desa ini terutama pada bantuan langsung.

Kebaharuan yang dilaksanakan peneliti terhadap penelitian oleh Meika Rozandi (2021) terletak pada Indikator derajat perubahan dari kebijakan dana desa di Desa Sukapura masih belum berjalan secara maksimal terutama derajat perubahan untuk tingkat kemiskinan yang seharusnya bisa menurun secara signifikan angka kemiskinan di Desa Sukapura. Akan tetapi, karena adanya beberapa kendala yang terjadi mengakibatkan derajat perubahan yang diinginkan tersebut belum berjalan secara maksimal.

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa untuk Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus di Desa Sukapura Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur) sebagai berikut.

Implementasi kebijakan penggunaan dana desa untuk pengentasan kemiskinan sudah dilaksanakan di Desa Sukapura melalui program Bantuan Langsung. Namun dari hasil pengamatan serta penggalian data melalui wawancara maupun observasi yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dana desa di Desa Sukapura masih belum optimal dalam pelaksanaan program yang sudah dirancang. Program yang dirancang oleh pemerintah terkait Kebijakan Dana Desa ini adalah pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur, pencegahan stunting dan pemberdayaan BUMDes. Guna mewujudkan program pengentasan kemiskinan, direalisasikan dengan pemberian Bantuan Langsung Tunai. Dimana dalam implementasinya muncul permasalahan utama dalam penyaluran bantuan langsung yang oleh peneliti dianalisis dengan indikator yang terkena pengaruh dalam implementasi kebijakan dana desa menurut Teori Mirrele S. Grindle (1980), yang terdiri dari dua dimensi yakni Isi Kebijakan dan Konteks Kebijakan yang dalam tiap-tiap dimensi tersebut ada beberapa indikator.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini keterbatasan utama yakni waktu. Keterbatasan waktu penulis maksimalkan dalam proses pengumpulan data dari Teknik pengumpulan data yaitu dalam observasi, dokumentasi dan wawancara.

**Arah Masa Depan Penelitian (future work).** Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian yang penulis laksanakan. Peneliti mengharapkan penelitian ini ada saran dan masukan demi kesempurnaan penelitian ini.

#### **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Desa Sukapura yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian dan memberikan informasi pada penelitian ini.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Dr. Rusmini. S.Ag. M.Pd.I. (2017). *Metode Penelitian Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods serta Research & Development*.
- Hidayat, E. (2020). *Implementasi Kebijakan Dana Desa untuk Penanggulangan an Pandemi Covid-19*.
- Jamaluddin, Y. (2018). *Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah*.
- Mingkid, G. J. (2017). *Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Peningkatan Pembangunan (Suatu Studi di Desa Watutumou Dua Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara)*.
- Pahlevi, I. (2015). *Dana Desa dan Permasalahannya*.
- Prof. Dr. A. Muri Yusuf. M.Pd. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Penelitian Gabungan*.
- Rozandi, M. (2021). *Implementasi Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan (Studi Kasus Desa Sengkubang Kecamatan Mempawah Hilir Provinsi Kalimantan Barat)*.
- Satori, D., & Komariah, A. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. alfabeta.

